KEBIJAKAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI SMK NON PESANTREN

Wenny Septasari[1], Kasful Anwar Us[2]

[1,2]*Institut Islam Ma'arif Jambi*
E-mail : wenny.muthmainnah@gmail.com[1], kasfulanwarus@uinjambi.ac.id[2]

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) non pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya kompeten dalam bidang kejuruan, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Namun, implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren masih menghadapi berbagai problematika yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, keterbatasan waktu pembelajaran, serta rendahnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran kejuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di SMK non pesantren serta mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode **library research** dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Merdeka, serta kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, rendahnya kompetensi keagamaan sebagian peserta didik, pengaruh negatif media digital, kurangnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran kejuruan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang integratif, pembiasaan budaya religius di sekolah, pemanfaatan teknologi digital secara positif, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pendidikan Islam di SMK non pesantren dalam membentuk lulusan yang unggul secara akademik, profesional, dan berkarakter Islami.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan Islam, Problematika Pendidikan Islam, SMK Non Pesantren, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Karakter.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat (Republik Indonesia, 2003).

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akidah, ibadah, akhlak, serta karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah (Muhaimin, 2022). Menurut Nata (2023), pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara utuh yang mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sehingga mampu melahirkan insan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi vokasional agar lulusan siap memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan pesantren yang menjadikan pendidikan agama sebagai ciri utama, SMK non pesantren memiliki fokus utama pada penguasaan kompetensi keahlian sesuai bidang vokasi. Kondisi tersebut menyebabkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK non pesantren sering kali hanya dilaksanakan sesuai alokasi jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Akibatnya, ruang untuk penguatan nilai-nilai keislaman melalui kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan religius menjadi relatif terbatas dibandingkan dengan lembaga pendidikan berbasis pesantren (Majid & Andayani, 2020).

Perkembangan teknologi digital, globalisasi, serta perubahan sosial turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan Islam di SMK non pesantren. Peserta didik saat ini hidup pada era digital yang memungkinkan mereka mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial tanpa batas. Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang untuk memperluas akses terhadap sumber belajar keislaman, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko masuknya konten negatif, penyebaran informasi yang tidak benar, menurunnya etika digital, serta berkurangnya minat peserta didik terhadap pembelajaran agama apabila tidak disertai dengan pendampingan yang memadai (Rahman & Suyadi, 2024).

Selain pengaruh teknologi, implementasi pendidikan Islam di SMK non pesantren juga menghadapi berbagai problematika internal. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran kejuruan, variasi kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif, serta masih rendahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter peserta didik. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pembentukan karakter religius, disiplin, tanggung jawab, dan etika profesional yang seharusnya menjadi bagian dari kompetensi lulusan SMK (Sauri & Nurdin, 2022).

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki tujuan membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Allah Swt. berfirman: Q.S. Al-Mujadilah (58): 11

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

Yā ayyuhallażīna āmanū iżā qīla lakum tafassaḥū fil-majālisi fafsaḥū yafsaḥillāhu lakum, wa iżā qīlansyuzū fansyuzū yarfa'illāhullażīna āmanū minkum wallażīna ūtul-'ilma darajāt, wallāhu bimā ta'malūna khabīr.

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah. **Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.** Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan merupakan dua aspek yang harus berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, pendidikan di SMK non pesantren tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi vokasional, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan moral dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kebijakan dan problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang berlaku pada SMK non pesantren, mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam implementasinya, serta mengkaji berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam sehingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter Islami.

METODE

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis penelitian **kepustakaan (library research)**. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk mengkaji suatu fenomena, konsep, teori, maupun kebijakan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kebijakan dan problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren berdasarkan berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta dokumen Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding, dan dokumen lain yang membahas pendidikan Islam, pendidikan vokasi, penguatan karakter, serta implementasi kebijakan pendidikan Islam di sekolah menengah kejuruan (Muhaimin, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Seluruh dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti kebijakan pendidikan Islam, implementasi Pendidikan Agama Islam di SMK non pesantren,

problematika pembelajaran, penguatan karakter, dan strategi pengembangan pendidikan Islam. Tahapan tersebut bertujuan memperoleh data yang komprehensif dan sistematis sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik analisis data menggunakan **analisis isi (*content analysis*)**. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber yang telah dikaji sehingga diperoleh gambaran mengenai kebijakan pendidikan Islam, problematika implementasinya di SMK non pesantren, serta alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Melalui teknik tersebut, data yang digunakan diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam di SMK Non Pesantren

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003). Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan, termasuk SMK non pesantren.

Implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperkuat karakter, dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Di SMK non pesantren, implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembelajaran PAI, salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, pesantren Ramadan, pembinaan Rohani Islam (Rohis), serta pembiasaan budaya religius di lingkungan sekolah (Muhaimin, 2022).

Kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren merupakan berbagai regulasi, program, dan implementasi yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan vokasional, serta karakter religius sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut meliputi aspek kurikulum, pembelajaran, penguatan karakter, budaya sekolah, dan kemitraan dengan berbagai pihak.

1. Kebijakan Pendidikan Agama Islam sebagai Mata Pelajaran Wajib

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan, termasuk SMK non pesantren. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin setiap peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya (Republik Indonesia, 2003).

2. Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di SMK dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kurikulum ini menekankan penguatan akidah, ibadah, akhlak, moderasi beragama, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

3. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Sekolah melaksanakan berbagai program pembiasaan yang bertujuan membentuk karakter religius peserta didik, seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kerja sama, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran maupun budaya sekolah (Muhaimin, 2022).

4. Pembiasaan Budaya Religius di Sekolah

SMK non pesantren umumnya memiliki kebijakan pembiasaan keagamaan sebagai bagian dari pendidikan karakter, antara lain:

1. Membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran.
2. Salat Zuhur berjamaah.
3. Kultum atau ceramah singkat.
4. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
5. Pesantren Ramadan.
6. Program infak dan sedekah.
7. Kegiatan Rohani Islam (Rohis).

Program-program tersebut bertujuan membentuk lingkungan sekolah yang religius dan kondusif bagi perkembangan akhlak peserta didik (Majid & Andayani, 2020).

5. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Mata Pelajaran Kejuruan

Pendidikan Islam tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran PAI, tetapi juga diintegrasikan dalam mata pelajaran produktif sesuai bidang keahlian. Misalnya:

1. Jurusan Akuntansi menanamkan nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah.
2. Jurusan Teknik menanamkan disiplin, keselamatan kerja, dan tanggung jawab.
3. Jurusan Bisnis dan Pemasaran menanamkan etika bisnis Islami.

Integrasi ini bertujuan membentuk lulusan yang profesional sekaligus berakhlak mulia (Nata, 2023).

6. Penguatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Sekolah mendorong guru PAI untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian melalui pelatihan, seminar, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta penguasaan teknologi digital agar pembelajaran menjadi lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman (Republik Indonesia, 2005).

7. Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Kebijakan pendidikan Islam juga menekankan pentingnya kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik. Bentuk implementasinya meliputi program parenting, komunikasi rutin dengan orang tua, pembinaan keagamaan, dan kerja sama dengan tokoh agama maupun lembaga sosial (Azra, 2019).

8. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembelajaran PAI

SMK non pesantren mulai memanfaatkan teknologi digital melalui Learning Management System (LMS), video pembelajaran, aplikasi pembelajaran Islami, kuis interaktif, dan media digital

lainnya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membangun literasi digital peserta didik yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam (Rahman & Suyadi, 2024).

9. Penguatan Etika Kerja Islami dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Sebagai sekolah vokasi, SMK memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Peserta didik dibekali etika kerja Islami seperti amanah, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, pelayanan yang baik, dan profesionalisme sehingga siap menghadapi dunia kerja dengan karakter yang baik.

10. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan

Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter religius, seperti Rohani Islam (Rohis), tilawah Al-Qur'an, kaligrafi, hadrah, dakwah remaja, lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), dan kegiatan bakti sosial. Program tersebut menjadi sarana pembinaan minat, bakat, dan kepemimpinan peserta didik dalam bidang keagamaan.

B. Problematika Pendidikan Islam di SMK Non Pesantren

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di SMK non pesantren masih menghadapi berbagai problematika. Salah satu persoalan utama adalah terbatasnya alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dibandingkan mata pelajaran kejuruan. Kondisi tersebut menyebabkan proses internalisasi nilai-nilai Islam belum berlangsung secara optimal karena sebagian besar waktu pembelajaran difokuskan pada penguasaan kompetensi vokasional (Majid & Andayani, 2020).

Problematika lainnya adalah pengaruh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang berdampak pada perilaku peserta didik. Kemudahan mengakses informasi sering kali diikuti dengan meningkatnya paparan terhadap konten negatif, rendahnya etika bermedia digital, menurunnya minat membaca Al-Qur'an, serta meningkatnya perilaku konsumtif dan individualistis (Rahman & Suyadi, 2024).

Selain itu, masih ditemukan rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam menjalankan ibadah, kurangnya penghormatan kepada guru, praktik ketidakjujuran akademik, serta kasus perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembentukan karakter religius masih memerlukan penguatan melalui pembelajaran dan pembiasaan yang berkelanjutan (Sauri & Nurdin, 2022; Ismawati et al., 2024).

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) non pesantren memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya kompeten dalam bidang vokasional, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam di SMK non pesantren masih menghadapi berbagai problematika yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut berasal dari faktor internal sekolah maupun faktor eksternal yang berkembang di masyarakat.

Salah satu problematika utama adalah **terbatasnya alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)**. Di SMK, sebagian besar jam pelajaran dialokasikan untuk mata pelajaran kejuruan dan praktik sesuai kompetensi keahlian. Akibatnya, guru PAI memiliki waktu yang terbatas untuk menyampaikan materi secara mendalam sekaligus melakukan pembinaan karakter peserta didik. Kondisi ini menyebabkan proses internalisasi nilai-nilai Islam belum berlangsung secara optimal (Majid & Andayani, 2020).

Problematika berikutnya adalah **belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran kejuruan**. Pada banyak SMK non pesantren, pembelajaran agama masih dipandang sebagai tanggung jawab guru PAI semata, sedangkan guru mata pelajaran produktif belum sepenuhnya mengaitkan materi kejuruan dengan nilai-nilai keislaman. Padahal, etika kerja,

kejujuran, tanggung jawab, amanah, disiplin, dan profesionalisme merupakan nilai-nilai Islam yang sangat relevan dengan pendidikan vokasi (Muhaimin, 2022).

Selain itu, **perkembangan teknologi digital dan media sosial** juga menjadi tantangan serius. Peserta didik memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi melalui internet, tetapi tidak seluruh informasi tersebut memberikan dampak positif. Penyalahgunaan media sosial, kecanduan gawai, paparan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, penyebaran hoaks, perjudian daring, hingga perundungan siber (*cyberbullying*) menjadi fenomena yang dapat memengaruhi perilaku dan karakter peserta didik apabila tidak disertai pengawasan serta literasi digital yang memadai (Rahman & Suyadi, 2024).

Permasalahan lain yang sering ditemukan adalah **menurunnya kualitas karakter dan akhlak peserta didik**. Berbagai penelitian menunjukkan masih adanya perilaku indisipliner, ketidakjujuran akademik, rendahnya rasa hormat kepada guru, kurangnya kepedulian sosial, serta meningkatnya kasus perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam masih perlu diperkuat melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta budaya sekolah yang religius (Sauri & Nurdin, 2022; Ismawati et al., 2024).

Problematika lainnya adalah **kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang belum merata**, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan model pembelajaran inovatif. Sebagian guru masih menggunakan metode ceramah secara dominan sehingga peserta didik menjadi kurang aktif dan kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Padahal, peserta didik generasi saat ini membutuhkan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan memanfaatkan media digital agar lebih sesuai dengan karakteristik mereka (Nata, 2023).

Di samping itu, **kurangnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat** juga menjadi kendala dalam pembentukan karakter peserta didik. Sekolah telah berupaya menanamkan nilai-nilai religius melalui pembelajaran dan pembiasaan, namun apabila lingkungan keluarga dan masyarakat tidak memberikan dukungan yang sejalan, maka hasil pendidikan menjadi kurang optimal. Orang tua yang kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai, ibadah, maupun pergaulan anak dapat menghambat keberhasilan pendidikan Islam di sekolah (Azra, 2019).

Contoh implementasi problematika dapat dilihat pada peserta didik SMK yang lebih fokus mempersiapkan uji kompetensi keahlian dan praktik kerja lapangan sehingga menganggap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran pelengkap. Di sisi lain, sebagian peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial dibandingkan membaca Al-Qur'an atau mengikuti kegiatan Rohani Islam (Rohis). Beberapa sekolah juga menghadapi kendala rendahnya partisipasi peserta didik dalam salat berjamaah, kegiatan keagamaan, maupun program pembinaan karakter karena padatnya jadwal praktik dan kegiatan vokasional.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren bersifat multidimensional. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan waktu pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, lemahnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan vokasi, kompetensi guru, karakter peserta didik, serta kurangnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif agar pendidikan Islam mampu mendukung pembentukan lulusan SMK yang unggul dalam kompetensi kejuruan sekaligus memiliki karakter Islami.

C. Faktor Penyebab Problematika Pendidikan Islam di SMK Non Pesantren

Problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan alokasi waktu pembelajaran PAI, belum optimalnya kompetensi sebagian guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis

teknologi, serta kurangnya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam mata pelajaran produktif atau kejuruan (Nata, 2023).

Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, lingkungan pergaulan, serta kurang optimalnya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dalam mendampingi anak juga menjadi salah satu penyebab lemahnya pembinaan karakter di rumah. Di sisi lain, dunia digital memberikan berbagai pengaruh yang dapat membentuk perilaku peserta didik apabila tidak disertai pengawasan yang memadai (Azra, 2019).

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...." (Q.S. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam membina akidah dan akhlak anak sebelum pendidikan tersebut diperkuat oleh sekolah dan masyarakat.

Problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI), pembentukan karakter peserta didik, serta keberhasilan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai keislaman.

1. Keterbatasan Alokasi Waktu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Salah satu penyebab utama problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren adalah terbatasnya alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagai sekolah vokasi, SMK lebih banyak memberikan porsi pembelajaran pada mata pelajaran kejuruan dan praktik sesuai dengan kompetensi keahlian. Akibatnya, guru PAI memiliki waktu yang relatif sedikit untuk menyampaikan materi secara mendalam sekaligus membina akhlak dan karakter peserta didik (Majid & Andayani, 2020).

Contoh: Guru PAI hanya memiliki beberapa jam pelajaran setiap minggu sehingga pembinaan ibadah, diskusi keagamaan, dan penguatan karakter belum dapat dilakukan secara maksimal.

2. Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital dan Media Sosial

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memperoleh informasi. Namun, tanpa pengawasan yang baik, teknologi juga dapat menjadi penyebab menurunnya kualitas pendidikan Islam. Peserta didik dapat dengan mudah mengakses konten negatif, berita bohong (*hoaks*), perjudian daring, pornografi, maupun konten kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengurangi minat belajar, membaca Al-Qur'an, serta mengikuti kegiatan keagamaan (Rahman & Suyadi, 2024).

Contoh: Sebagian peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu bermain media sosial atau gim daring dibandingkan mengikuti kajian Rohani Islam (Rohis) atau membaca literatur keislaman.

3. Belum Optimalnya Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Mata Pelajaran Kejuruan

Di banyak SMK non pesantren, pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih dianggap sebagai tanggung jawab guru PAI saja. Sementara itu, guru mata pelajaran produktif belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembelajaran. Padahal, pendidikan vokasi sangat membutuhkan nilai kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan profesionalisme yang merupakan bagian dari ajaran Islam (Muhaimin, 2022).

Contoh: Pada pembelajaran akuntansi, peserta didik mempelajari penyusunan laporan keuangan tanpa dikaitkan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam Islam.

4. Kompetensi Guru yang Belum Merata

Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan pendidikan Islam. Namun, masih terdapat guru yang belum menguasai teknologi pembelajaran, metode pembelajaran inovatif, maupun strategi penguatan karakter. Pembelajaran yang masih didominasi metode ceramah menyebabkan peserta didik kurang aktif dan kurang tertarik mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam (Nata, 2023).

Contoh: Guru hanya menggunakan buku teks dan ceramah tanpa memanfaatkan video pembelajaran, aplikasi digital, atau metode diskusi sehingga pembelajaran terasa monoton.

5. Rendahnya Motivasi Belajar dan Kesadaran Beragama Peserta Didik

Sebagian peserta didik menganggap Pendidikan Agama Islam hanya sebagai mata pelajaran pelengkap sehingga motivasi belajar menjadi rendah. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik kurang aktif mengikuti pembelajaran, kurang disiplin dalam beribadah, serta belum mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Sauri & Nurdin, 2022).

Contoh: Masih ditemukan peserta didik yang enggan mengikuti salat berjamaah, tidak aktif dalam kegiatan keagamaan sekolah, atau melakukan pelanggaran tata tertib.

6. Kurangnya Dukungan dan Pengawasan dari Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Apabila orang tua kurang memberikan teladan, pengawasan, maupun pembinaan keagamaan di rumah, maka pendidikan Islam yang diberikan di sekolah menjadi kurang efektif. Sinergi antara sekolah dan keluarga sangat diperlukan agar pembentukan karakter peserta didik berlangsung secara berkelanjutan (Azra, 2019).

Contoh: Orang tua tidak mengawasi penggunaan telepon genggam anak sehingga anak bebas mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

7. Pengaruh Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Apabila peserta didik berada dalam lingkungan yang kurang kondusif, mereka lebih mudah terpengaruh oleh perilaku negatif seperti merokok, tawuran, perundungan (*bullying*), penyalahgunaan media sosial, maupun pelanggaran tata tertib sekolah (Ismawati et al., 2024).

Contoh: Peserta didik mengikuti teman untuk membolos, melakukan perundungan terhadap teman lain, atau menggunakan bahasa yang kurang sopan karena pengaruh lingkungan.

8. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Islam

Keberhasilan pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti musala, perpustakaan keislaman, media pembelajaran digital, laboratorium PAI, serta perangkat teknologi pendukung. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran maupun kegiatan keagamaan di sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Contoh: Musala sekolah tidak mampu menampung seluruh peserta didik sehingga pelaksanaan salat berjamaah dilakukan secara bergantian dan kurang efektif.

9. Pengaruh Globalisasi dan Perubahan Sosial

Globalisasi membawa banyak perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Peserta didik lebih mudah mengadopsi budaya luar yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti gaya hidup konsumtif, individualistis, dan hedonis. Apabila tidak diimbangi dengan pendidikan agama yang kuat, kondisi tersebut dapat memengaruhi karakter peserta didik (Azra, 2019).

Contoh: Sebagian peserta didik lebih tertarik mengikuti tren media sosial dibandingkan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga memerlukan penguatan kompetensi guru, integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran, optimalisasi peran keluarga, penyediaan sarana yang memadai, pemanfaatan teknologi secara positif, serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha serta dunia industri. Dengan demikian, pendidikan Islam di SMK non pesantren dapat berjalan lebih efektif dalam membentuk lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berakhlak mulia.

D. Strategi Mengatasi Problematika Pendidikan Islam di SMK Non Pesantren

Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren dapat diatasi melalui beberapa strategi.

1. Meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan agar mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi (Sugiyono, 2022).
2. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh mata pelajaran, terutama mata pelajaran kejuruan, sehingga peserta didik memahami bahwa etika kerja, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme merupakan bagian dari ajaran Islam (Muhaimin, 2022).
3. Ketiga, memperkuat budaya religius di sekolah melalui pembiasaan salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, kajian keislaman, infak Jumat, kegiatan Rohis, dan program pembinaan karakter secara berkelanjutan.
4. Keempat, meningkatkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta masyarakat dalam membina karakter peserta didik. Kelima, memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang interaktif dan edukatif sehingga peserta didik dapat menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab (Rahman & Suyadi, 2024).

Pendidikan Islam di SMK non pesantren menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta orientasi pendidikan kejuruan yang lebih menekankan pada kompetensi kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar pendidikan Islam mampu membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi vokasional sekaligus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

1. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam dalam Seluruh Mata Pelajaran

Pendidikan Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam (PAI), tetapi juga seluruh guru mata pelajaran. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, amanah, profesionalisme, dan etos kerja Islami dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kejuruan maupun mata pelajaran umum. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.

Allah Swt. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar." (Q.S. At-Taubah [9]: 119). Ayat tersebut menegaskan pentingnya membangun karakter kejujuran sebagai salah satu nilai utama dalam pendidikan.

2. Memanfaatkan Teknologi Digital sebagai Media Pembelajaran Islam

Perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang inovatif. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, aplikasi Al-Qur'an digital, platform Learning Management System (LMS), media sosial edukatif, podcast Islami, maupun kuis interaktif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik.

Pemanfaatan teknologi secara bijaksana juga membantu peserta didik mengembangkan literasi digital sehingga mampu menyaring informasi yang benar serta menghindari pengaruh negatif media sosial.

3. Memperkuat Budaya Religius di Lingkungan Sekolah

Sekolah perlu membangun budaya religius melalui berbagai kegiatan pembiasaan, seperti:

1. salat Zuhur berjamaah;
2. tadarus Al-Qur'an sebelum pembelajaran;
3. doa bersama;
4. kultum;
5. program Jumat Berkah;
6. infak dan sedekah;
7. pesantren Ramadan;
8. peringatan hari besar Islam.

Budaya religius yang dilaksanakan secara konsisten akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial.

4. Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru PAI perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, workshop, maupun komunitas belajar. Kompetensi yang perlu dikembangkan meliputi:

1. pembelajaran berbasis teknologi;
2. strategi pembelajaran aktif;
3. pendidikan karakter;
4. moderasi beragama;
5. asesmen pembelajaran;
6. literasi digital.

Guru yang profesional akan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital.

5. Memperkuat Kerja Sama antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Pendidikan karakter tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri (DUDI). Bentuk kerja sama tersebut antara lain:

1. komunikasi rutin dengan orang tua;
2. pembinaan keagamaan bersama;
3. pengawasan penggunaan media digital;
4. pembinaan karakter selama Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat.

Kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter peserta didik secara menyeluruh.

6. Mengembangkan Literasi Digital Berbasis Nilai-Nilai Islam

Peserta didik perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital berbasis Islam mencakup kemampuan:

1. memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya;
2. menghindari hoaks;
3. menjaga etika komunikasi di media sosial;
4. menghargai privasi orang lain;
5. memanfaatkan internet untuk belajar dan berdakwah.

Strategi ini penting agar peserta didik menjadi pengguna teknologi yang produktif sekaligus berakhlak mulia.

7. Mengoptimalkan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan

Ekstrakurikuler seperti Rohani Islam (Rohis), tilawah Al-Qur'an, kaligrafi, hadrah, tahfiz, kajian Islam, dan bakti sosial Islami dapat menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial peserta didik.

Kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat serta memperkuat identitas keislamannya.

8. Mengembangkan Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)

Guru dapat mengembangkan proyek pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi kejuruan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya:

1. membuat media dakwah digital;
2. merancang kampanye etika kerja Islami;
3. mengembangkan produk kreatif bernuansa Islami;
4. melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Strategi ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik belajar melalui pengalaman nyata.

9. Menanamkan Moderasi Beragama

Sekolah perlu mengembangkan sikap moderat dalam beragama melalui pembelajaran yang menanamkan nilai:

1. toleransi;
2. keadilan;
3. anti kekerasan;
4. menghargai keberagaman;
5. cinta tanah air;
6. musyawarah.

Moderasi beragama penting agar peserta didik mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

10. Melakukan Evaluasi dan Penguatan Program Secara Berkelanjutan

Program pendidikan Islam perlu dievaluasi secara berkala melalui:

1. penilaian karakter peserta didik;
2. supervisi pembelajaran;
3. evaluasi budaya religius sekolah;
4. survei kepuasan peserta didik dan orang tua;
5. refleksi guru terhadap proses pembelajaran.

Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan inovasi pendidikan Islam yang lebih efektif.

Strategi mengatasi problematika pendidikan Islam di SMK non pesantren harus dilakukan secara terpadu melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran, pemanfaatan teknologi digital, penguatan budaya religius sekolah, peningkatan kompetensi guru, kolaborasi

dengan orang tua dan masyarakat, pengembangan literasi digital, optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis proyek, penanaman moderasi beragama, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, pendidikan Islam di SMK non pesantren diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul dalam kompetensi vokasional, memiliki akhlak mulia, berkarakter Islami, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan zaman.

E. Implikasi Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Karakter dan Kompetensi Lulusan SMK Non Pesantren

Implementasi kebijakan pendidikan Islam memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter dan kompetensi lulusan SMK non pesantren. Peserta didik tidak hanya dibekali keterampilan vokasional sesuai bidang keahlian, tetapi juga memiliki nilai-nilai religius, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, etos kerja, kepedulian sosial, dan integritas dalam menjalankan profesinya (Muhaimin, 2022).

Integrasi pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan juga membentuk etika profesional yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Lulusan SMK diharapkan mampu bekerja secara kompeten sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika Islam. Hal tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan global yang tidak hanya menuntut kemampuan teknis (*hard skills*), tetapi juga kemampuan interpersonal, komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, dan karakter yang baik (Nata, 2023).

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang diimplementasikan secara konsisten akan menghasilkan lulusan SMK non pesantren yang memiliki keseimbangan antara kompetensi akademik, keterampilan vokasional, kecerdasan spiritual, serta akhlak mulia. Lulusan seperti inilah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia kerja, masyarakat, dan pembangunan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan kompetensi lulusan. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun kepribadian peserta didik agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi kejuruan yang dimiliki. Dengan demikian, lulusan SMK diharapkan tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab, dan etika profesi yang sesuai dengan ajaran Islam (Muhaimin, 2022).

1. Terbentuknya Karakter Religius

Salah satu implikasi utama dari kebijakan pendidikan Islam adalah terbentuknya karakter religius peserta didik. Melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, pembiasaan ibadah, kegiatan Rohani Islam (Rohis), tadarus Al-Qur'an, salat berjamaah, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, peserta didik dibiasakan untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut membantu membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, serta memiliki kesadaran spiritual yang kuat (Sauri & Nurdin, 2022).

Contoh implementasi: Peserta didik terbiasa melaksanakan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai, menjaga sopan santun kepada guru, dan menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam kehidupan sekolah.

2. Meningkatnya Etika Kerja dan Profesionalisme

Pendidikan Islam memberikan kontribusi terhadap pembentukan etika kerja yang baik. Nilai-nilai seperti amanah, disiplin, jujur (*ṣidq*), tanggung jawab, kerja keras, dan profesionalisme menjadi bekal penting bagi lulusan SMK ketika memasuki dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran kejuruan membantu peserta didik memahami bahwa keberhasilan bekerja tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh akhlak dan integritas (Nata, 2023).

Contoh implementasi: Saat mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL), peserta didik dibiasakan datang tepat waktu, menjaga amanah perusahaan, bekerja sesuai prosedur, serta memberikan pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab kepada pelanggan.

3. Meningkatnya Kompetensi Sosial dan Kepemimpinan

Kebijakan pendidikan Islam juga berimplikasi pada berkembangnya kompetensi sosial peserta didik. Melalui kegiatan organisasi Rohis, bakti sosial, zakat, infak, pesantren Ramadan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, peserta didik belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, serta mengembangkan kemampuan memimpin. Kompetensi sosial tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja yang menuntut kemampuan berkolaborasi (Azra, 2019).

Contoh implementasi: Peserta didik menjadi pengurus Rohis, memimpin kegiatan keagamaan, mengelola program infak Jumat, atau menjadi panitia kegiatan sosial sehingga kemampuan komunikasi dan kepemimpinannya berkembang.

4. Terbentuknya Literasi Digital yang Beretika

Di era digital, kebijakan pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pendidikan Islam memberikan pemahaman mengenai etika bermedia sosial, pentingnya menyaring informasi, menghindari penyebaran berita bohong (*hoaks*), menjaga kesantunan dalam komunikasi digital, serta menggunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat (Rahman & Suyadi, 2024).

Contoh implementasi: Peserta didik membuat konten dakwah digital, poster edukasi Islami, video pembelajaran agama, atau kampanye penggunaan media sosial yang sehat sebagai bagian dari proyek pembelajaran.

5. Meningkatnya Daya Saing Lulusan

Lulusan SMK non pesantren tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis (*hard skills*), tetapi juga kompetensi nonteknis (*soft skills*) yang menjadi kebutuhan dunia kerja. Pendidikan Islam memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter disiplin, jujur, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama sehingga meningkatkan daya saing lulusan dalam menghadapi persaingan kerja di era global (Majid & Andayani, 2020).

Contoh implementasi: Dunia usaha lebih percaya kepada lulusan yang memiliki keterampilan kerja sekaligus menunjukkan integritas, etika profesi, dan kemampuan bekerja dalam tim.

6. Terwujudnya Profil Lulusan yang Seimbang antara IMTAQ dan IPTEK

Tujuan akhir kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara **iman dan takwa (IMTAQ)** serta **ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)**. Lulusan tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi atau menguasai kompetensi keahlian tertentu, tetapi juga memiliki landasan moral dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Muhaimin (2022) bahwa pendidikan Islam harus menghasilkan *insan kamil*, yaitu manusia yang berkembang secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter religius, peningkatan etika kerja, penguatan kompetensi sosial, pengembangan literasi digital yang bertanggung jawab, serta

peningkatan daya saing lulusan. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, dukungan kepala sekolah, keterlibatan orang tua, budaya sekolah, serta sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu terus diperkuat melalui pengembangan kurikulum yang integratif, peningkatan kompetensi pendidik, pembiasaan budaya religius, serta evaluasi yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan lulusan SMK non pesantren yang unggul secara akademik, profesional, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam.

Pendidikan Islam di SMK non pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul dalam kompetensi vokasional, tetapi juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berbagai kebijakan, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan pendidikan karakter, budaya religius sekolah, dan moderasi beragama, telah menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan Islam. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah problematika, seperti terbatasnya waktu pembelajaran PAI, pengaruh negatif era digital, rendahnya motivasi belajar agama, kurangnya integrasi nilai Islam dalam mata pelajaran kejuruan, serta tantangan pembinaan karakter peserta didik.

Di era digital, respons yang diperlukan bukan hanya mempertahankan pembelajaran agama secara konvensional, tetapi juga melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi, penguatan budaya religius sekolah, peningkatan kompetensi guru, pengembangan literasi digital, serta kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia industri. Dengan demikian, pendidikan Islam di SMK non pesantren dapat tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman sekaligus mampu menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter Islami, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan tersebut bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya menguasai kompetensi vokasional, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi kebijakan dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, pembiasaan budaya religius di sekolah, penguatan pendidikan karakter, integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran kejuruan, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan Islam di SMK non pesantren masih menghadapi berbagai problematika, seperti terbatasnya alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran kejuruan, pengaruh perkembangan teknologi digital dan globalisasi, rendahnya motivasi belajar dan karakter religius sebagian peserta didik, kompetensi guru yang belum merata, serta kurang optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha serta dunia industri. Berbagai faktor tersebut memengaruhi efektivitas pembentukan karakter dan pencapaian tujuan pendidikan Islam.

Untuk mengatasi problematika tersebut diperlukan strategi yang komprehensif melalui peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, penguatan budaya religius di sekolah, pemanfaatan teknologi digital secara edukatif, integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, serta penguatan kolaborasi antara

sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha serta dunia industri. Strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan spiritual, moral, intelektual, dan keterampilan peserta didik secara seimbang.

Implikasi dari implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren adalah terbentuknya lulusan yang memiliki keseimbangan antara iman dan takwa (IMTAQ) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Lulusan tidak hanya memiliki kompetensi teknis sesuai bidang keahlian, tetapi juga memiliki integritas, etika profesi, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, kepedulian sosial, dan akhlak mulia. Dengan demikian, penguatan kebijakan pendidikan Islam di SMK non pesantren menjadi salah satu langkah strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia kerja, masyarakat, serta pembangunan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. Al-'Alaq (96): 1.

Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. Al-Mujadilah (58): 11.

Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. At-Tahrim (66): 6.

Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. At-Taubah [9]: 119

Aisyah, S., & Kurniawan, D. (2025). Literasi digital dalam penguatan karakter peserta didik pada era *Society 5.0*. *Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(1), 45–59.

Ananda, R. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya.

Arifin, Z. (2020). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.

Daulay, H. P. (2020). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana.

Hamalik, O. (2020). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan, M. (2021). *Inovasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

Ismawati, A., dkk. (2024). Dampak *bullying* terhadap kesehatan mental peserta didik. *Jurnal Pendidikan*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Capaian Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Khoirunnisa, N., Ferryka, P. Z., & Rofisian, N. (2024). Dampak *bullying* terhadap perkembangan anak dalam perspektif pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *6*(2), 2450–2458.

Lubis, R., Harahap, S., & Nasution, F. (2025). Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam pada sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, *10*(1), 22–37.

Majid, A., & Andayani, D. (2020). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Muhaimin. (2022). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nata, A. (2023). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Rahman, A., & Suyadi. (2024). Transformasi pendidikan Islam pada era digital: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *21*(1), 1–16.

Ramayulis. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
Rohmah, N., & Adhawiyah, R. (2025). Strategi penguatan karakter dalam pencegahan *bullying* di madrasah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *15*(1), 66–79.
Sanjaya, W. (2021). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
Sauri, S., & Nurdin, N. (2022). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(2), 135–148.
Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Suyadi. (2023). *Pendidikan Islam di Era Society 5.0*. Yogyakarta: Deepublish.
Uno, H. B. (2021). *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.